LAPORAN PENERAPAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT. BPR HARTA MANDIRI
PERIODE TAHUN 2016

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan di masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan perdemongan pada prinsip-prinsip GCG. Adapun penjabarannya sebagaimana akan dibahas pada laporan ini.

A. TUJUAN PELAKSANAAN GCG DI BPR HARTA MANDIRI

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada *Stakeholders*.
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

B. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

I. Dewan Direksi

a. *SUSUNAN DIREKSI*

Susunan Direksi BPR Harta Mandiri sampai dengan periode akhir tahun 2016 terdiri dari 2 (dua) orang, seorang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	JABATAN	EFEKTIF PENUNJUKAN		TAHUN BERAKHIR MASA JABATAN
		RUPS TANGGAL	TANGGAL PERSETUJUAN OJK	
JANSEN LINGGA	Direktur Utama	16 Juli 2007	19 Juni 2007	06 Januari 2020
ALISYAHBANA	Direktur	12 Maret 2014	07 Mei 2014	06 Januari 2020

b. *JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKSI*

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah dan Komposisi Direksi BPR Harta Mandiri

Jumlah : Terdiri dari 2 (dua) orang Direksi

Komposisi :

- 1 (satu) orang sebagai Direktur Utama
- 1 (satu) orang sebagai Direktur

2. Kriteria & Independensi Direksi BPR Harta Mandiri

NO	KRITERIA	DIREKTUR UTAMA		DIREKTUR	
		IYA	TIDAK	IYA	TIDAK
1.	Seluruh Anggota Direksi bertempat tinggal di Kota Pekanbaru	√		√	
2.	Tidak memiliki hubungan keluarga/ Semenda dengan sesama Direksi atau Komisaris	√		√	
3.	Tidak memiliki saham 25% atau lebih dari Modal Setor Bank	√		√	
4.	Memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian serta kemampuan sebagaimana diatur oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.	√		√	
5.	Telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>fit & proper test</i>) sesuai dengan ketentuan yang mengatur.	√		√	
6.	Tidak merangkap jabatan pada Bank/ perusahaan lain	√		√	
7.	Tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas & wewenang tanpa batas	√		√	

c. FREKUENSI RAPAT

Manajemen BPR Harta Mandiri, terhitung mulai tahun 2014 untuk pelaksanaan rapat Direksi dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu setiap bulannya dengan peserta Direksi dan karyawan setingkat Pejabat Eksekutif.

Selama tahun 2016, pelaksanaan rapat Direksi telah dilaksanakan sebanyak dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH RAPAT	KEHADIRAN	PERSENTASE
JANSEN LINGGA	40	40	100%
ALI SYAHBANA		38	95%

Cat : Ketidakhadiran dikarenakan Cuti Kerja

d. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut:

a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.

✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :

- 1) Pelaksanaan & penatausahaan kegiatan operasional Bank
- 2) Menetapkan peraturan perusahaan dan evaluasi dalam pelaksanaannya
- 3) Merencanakan, menetapkan sistem operasional Bank
- 4) Menetapkan kebijakan tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan operasional Bank dengan pembagian tugas yang jelas.

- 5) Menetapkan strategi pencapaian misi dan visi Bank dan melakukan evaluasinya
 - 6) Pengendalian Keuangan dan Asset BPR
 - 7) Pencapaian tingkat Kesehatan bank secara wajar.
 - 8) Upaya dalam usaha mengoptimalkan Pendapatan dan Laba BPR serta melakukan pengendalian terhadap Biaya.
 - 9) Menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan Laporan realisasi pelaksanaannya yang telah disetujui Dewan Komisaris
 - 10) Merencanakan pengembangan produk, jaringan kantor, dan peningkatan kemampuan SDM Bank
 - 11) Mengevaluasi pelaksanaan operasional Bank, peraturan perusahaan dan hasil kerja staff dan karyawan.
 - 12) Melakukan hubungan dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan volume usaha Bank, dan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi Bank
 - 13) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia.
 - 14) Memberi persetujuan pinjaman bersama dengan anggota Komite Kredit lainnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan melalui SK Direksi.
- b. Mengelola perusahaan sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan Perundang-undangan.
- ✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :
- 1) Menetapkan arah kebijakan dan memimpin perusahaan.
 - 2) Memimpin, mengurus dan menguasai serta memelihara perusahaan yang bertujuan untuk kepentingan perusahaan.
 - 3) Mewakili perusahaan dalam hal kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di luar kegiatan internal perusahaan dan dalam hubungan kerja dengan pihak ketiga.
 - 4) Mewakili dan menerima kuasa Dewan Komisaris jika berhalangan untuk berhubungan dengan pihak ketiga
 - 5) Menetapkan dan mengatur segala ketentuan yang berkaitan dengan kepegawaian dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
 - 6) Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan atau RUPS lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
 - 7) Mengangkat dan memberhentikan karyawan.
 - 8) Membuat Laporan Tahunan dan dikumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 9) Menetapkan kebijakan tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan operasional Bank dengan pembagian tugas yang jelas.
- c. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- ✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :
- 1) Telah menetapkan Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Tata Kelola GCG

- 2) *Pemenuhan Struktur Organisasi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam penerapan Tata Kelola GCG antara lain yaitu :*
 - a) *Telah dilaksanakan penunjukan Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan.*
 - b) *Telah diangkat Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan serta Manajemen Resiko*
 - c) *Telah melengkapi dan melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kerja.*
- d. Menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan Audit Internal, Audit Eksternal, fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas lainnya.
 - ✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :
Melakukan tindak lanjut dan perbaikan atas hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan batas waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.
- e. Memastikan terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai
 - ✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :
Pelaksanaan kegiatan penerimaan karyawan baru guna melengkapi formasi kebutuhan karyawan di masing-masing unit kerja.
- f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan yang telah ditentukan.
 - ✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan yang mengatur terhadap pelaksanaannya.
- g. Mengungkapkan Kebijakan BPR yang bersifat Strategis di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai yang ada.
 - ✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :
Setiap 1 (satu) kali dalam sebulan, manajemen BPR Harta Mandiri telah menetapkan pelaksanaan rapat bersama dengan seluruh karyawan, yang mana pada kesempatan tersebut akan dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis manajemen di bidang kepegawaian serta dilakukan evaluasi kinerja pada bulan sebelumnya sebelumnya.
- h. Dilarang menggunakan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan
 - ✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :
Kondisi ini belum pernah direalisasikan pelaksanaannya
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
 - ✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :
Memberikan informasi realisasi keuangan setiap bulannya dan laporan perkembangan tingkat kesehatan perusahaan serta laporan kredit bermasalah.

- j. Wajib untuk memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi
 ✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :
 Telah direalisasikan membuat pedoman dan tata tertib Direksi

II. Dewan Komisaris

a. SUSUNAN KOMISARIS

Susunan Dewan Komisaris BPR Harta Mandiri untuk periode sampai dengan akhir tahun 2016 antara lain adalah sebagai berikut :

NAMA	JABATAN	EFEKTIF PENUNJUKAN		TAHUN BERAKHIR MASA JABATAN
		RUPSTANGGAL	TANGGAL PERSETUJUAN OJK	
SIM ENGLIAN	Komisaris Utama	16 Juli 2007	19 Juni 2007	06 Januari 2020
SUAINIE	Komisaris Anggota	16 Juli 2007	19 Juni 2007	06 Januari 2020

b. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris BPR Harta Mandiri

Jumlah : Terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris

Komposisi :

- 1 (satu) orang sebagai Komisaris Utama
- 1 (satu) orang sebagai Komisaris Anggota

b. Kriteria & Independensi Dewan Komisaris BPR Harta Mandiri

NO	KRITERIA	KOMISARIS UTAMA		KOMISARIS ANGGOTA	
		IYA	TIDAK	IYA	TIDAK
1.	Seluruh Anggota Komisaris bertempat tinggal di Kota Pekanbaru	√		√	
2.	Tidak memiliki hubungan keluarga/ Semenda dengan sesama Komisaris dan atau dengan Direksi	√		√	
4.	Telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>fit & proper test</i>) sesuai dengan ketentuan yang mengatur.	√		√	
5.	Tidak merangkap lebih dari 2 (dua) jabatan dengan jabatan yang sama pada Bank/ perusahaan lain	√		√	
6.	Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi/ Pejabat Eksekutif pada BPR/BPRS atau pada Bank Umum	√		√	

c. *PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS*

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan, memberikan nasihat, memberikan pengarahan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas & tanggungjawab Direksi.
- c. Tidak terlibat/ ikut serta dalam pengambilan keputusan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan operasional BPR, kecuali terhadap hal yang berkaitan dengan penyediaan dana kepada pihak terkait atau hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit, baik itu hasil audit Internal maupun Eksternal
- e. Berkewajiban untuk memberitahukan setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan atau keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

III. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada kalangan Pengurus dan Pegawai Bank. Untuk itu Bank telah melakukan langkah-langkah mencegah benturan kepentingan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menerbitkan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan segala bentuk aktivitas kegiatan perusahaan, baik itu dalam bentuk Surat Keputusan Direksi ataupun dalam bentuk Standar Prosedur Operasi.
2. Penegasan rangkaian tugas dan tanggung jawab setiap karyawan dalam bentuk Deskripsi Pekerjaan (*jobdesc*).
3. Meningkatkan pengetahuan karyawan melalui program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh perusahaan sendiri atau melalui lembaga pendidikan lainnya.

IV. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, Dan Audit Ekstern

1. *FUNGSI KEPATUHAN*

BPR Harta Mandiri dalam menindaklanjuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Tata Kelola, telah menunjuk Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam penerapan fungsi kepatuhan, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

- a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank.
- b. Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui training yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
- c. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka/ mengadakan sosialisasi ke divisi/ bagian, kantor cabang atau kantor kas.
- d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
- e. Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.

- g. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Untuk penerapan fungsi Kepatuhan, pejabat eksekutif kepatuhan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Pengkajian Rancangan Kebijakan :

Melakukan pengkajian kebijakan antara lain :

- 1) Rancangan Kebijakan Produk/ Aktivitas Baru antara lain :
 - a) Dilakukan pengkajian ulang dan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penghentian penjualan pemasaran produk Dana Talangan Haji yang mana program ini tidak lagi dibenarkan oleh Pemerintah melalui Departemen Agama.
 - b) Pengkajian ulang terhadap penyaluran kredit kolektif di lingkungan Pegawai Instansi Pemerintahan yang mana di pertengahan tahun 2016, Pemerintah telah banyak mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan tertib administrative kepegawaian.
 - c) Pengkajian ulang terhadap rencana pembukaan Kantor Cabang di Daerah Kabupaten Siak.
 - d) Rencana dilakukan pengembangan produk jasa pelayanan pembayaran dalam bentuk payment point.
- 2) Rancangan Kebijakan Internal antara lain :
 - a) Guna menindaklanjuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Tata Kebla, di tahun 2016 telah dilakukan pengkajian ulang dalam hal Komite Kredit, yang mana dengan ditunjuknya salah satu di antara dua orang Direksi untuk membawahi fungsi kepatuhan, Direksi tersebut tidak lagi menjadi bahagian dalam Komite Kredit sebagai mana sebelumnya. Sehingga terjadi perubahan dalam hal Batas Wewenang Pemberian Kredit (BWK).
 - b) Guna menindaklanjuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Tata Kebla, di tahun 2016 telah dilakukan pemenuhan struktur organisasi yang salah satunya adalah dengan mengangkat Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI).
 - c) Ketentuan pemberian suku bunga Simpanan dan Pinjaman
- 3) Rancangan Kebijakan Operasional/ SOP antara lain :
 - a) Dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Jaminan Kesehatan karyawan yang merupakan fasilitas kesehatan Internal perusahaan.
 - b) Diterbitkannya Standar Prosedur Operasional mengenai Tata Kebla GCG
 - c) Dilakukan pengkajian ulang mengenai ketentuan yang berkaitan dengan prosedur penerimaan dan perlakuan setoran dana melalui Bank Koresponden.
- 4) Rancangan kebijakan perkreditan antara lain :

b. Pemantauan Pemberian Kredit

- 1) Melakukan review dan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan internal perusahaan untuk disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang dikeluarkan oleh Regulator Jasa Keuangan ataupun Badan Pemerintahan melalui Undang-undang dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran kredit.
- 2) Melakukan review terhadap kebijakan penyaluran kredit kolektif di lingkungan pegawai Pemerintahan sebagai bentuk tindaklanjut pengelolaan resiko terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang melakukan evaluasi dalam system kepegawaian.

- 3) Penyesuaian terhadap batas wewenang pengambilan keputusan kredit sebagai bentuk tindak lanjut penerapan Tata Kelola BPR.

c. Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan

Pelaksanaan sosialisasi merupakan salah satu upaya peningkatan budaya kepatuhan yang telah dilakukan antara lain adalah dengan mengadakan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal (Ketentuan BI/OJK) secara langsung (*direct*) ataupun secara tidak langsung (*indirect*).

Indirect sosialisasi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pengiriman Surat Keputusan atau Surat Edaran atau bentuk lainnya tentang ketentuan internal dan eksternal yang diterbitkan yang berkaitan dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan kerja kepada seluruh unit kerja dan Kantor Cabang/ Kas.
- 2) Menjadikan sebagai bahagian dari tugas dan tanggung jawab pimpinan unit kerja untuk melakukan sosialisasi kembali kepada seluruh staff melalui mekanisme *morning briefing* atau melaksanakan forum-forum diskusi sesuai kebutuhan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah disosialisasikan dalam lingkup manajemen.

Direct Sosialisasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan training Penerapan Fungsi Kepatuhan yang selama tahun 2016 telah dilakukan dengan rincian antara lain adalah sebagai berikut :

MATERI		PESERTA		PERIODE PELAKSANAAN
A. DIREKSI & PEJABAT EXECUTIVE				
1.	Sertifikasi Direksi	1	Staff SPI	25 Jan '16 sd 11 Februari 2016
2.	Auditor Yang Efektif	1	Staff SPI	23 sd 24 Mei 2016
3.	Analisa Kredit UMKM	1	Kabag. Marketing	4.s.d.5 April 2016
4.	Manajemen Resiko	1	Kasi Kredit	2 Februari 2016
5.	Lelang & Eksekusi Kredit Macet	1	Direktur	17 sd 18 Maret 2016
6.	Fungsi Kepatuhan	2	PE Kepatuhan & Dirut	21 Juli 2016
7.	Training for Trainer (TOT)	2	PE Kepatuhan & Direktur	06 sd 07 Agustus 2016
8.	Tata Kelola SDM	1	Direktur Utama	05 sd 06 September 2016
9.	Sertifikasi Komisaris	1	Komisaris Utama	14 sd 25 September 2016
10.	APU dan PPT	1	Kabag. Marketing	18 Oktober 2016
11.	Rencana Bisnis BPR	2	PE Kepatuhan & Dirut	16 sd 17 November 2016
12.	Analisa Kredit	1	Kabag. Marketing	14 sd 15 November 2016
13.	Pelatihan PPh PS.21 Komprehensif	1	Direktur Utama	21 sd 22 September 2016

MATERI		PESERTA		PERIODE PELAKSANAAN
B. UNIT KEUANGAN & ADUM				
1.	W.O.W. Service Excellent (Staff Teller)	1	Staff Teller	28 Maret 2016
2.	Pelatihan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	1	Staff EDP	08 sd 09 Oktober 2016

MATERI		PESERTA		PERIODE PELAKSANAAN
C. UNIT KERJA KREDIT				
1.	<i>Lelang & Eksekusi Kredit Macet</i>	1	<i>Staff Legal Kredit</i>	17 sd 18 Maret 2016
2.	<i>Penilaian Agunana Kredit</i>	1	<i>Staff Aprisal</i>	22 Agustus 2016

MATERI		PESERTA		PERIODE PELAKSANAAN
D. UNIT KERJA MARKETING				
1.	<i>Sales Management Skill</i>	1	Account Officer	07 s.d 08 Desember 2016

MATERI		PESERTA		PERIODE PELAKSANAAN
E. SATUAN PENGAWASAN INTERNAL				
1.	<i>APU dan PPT</i>	1	Staff SPI	18 Oktober 2016
2.	<i>Strategi Mencegah Fraud</i>	1	Staff SPI	17 Oktober 2016

d. Pemantauan Pemenuhan Komitmen

- 1) Komitmen BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, hingga akhir Desember 2016 telah dapat diselesaikan sesuai dengan waktu komitmen penyelesaian yang disepakati.
- 2) Komitmen BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemenuhan Modal Inti, yang mana hingga akhir tahun 2016 komitmen target laba setiap tahun dapat direalisasikan.

2. AUDIT INTERN

Dengan keberadaan Audit Internal sesuai dengan fungsi dan tugasnya di sebuah Bank, dan dari hasil laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan akan dapat menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan berguna bagi pihak manajemen dalam melakukan tindakan antara lain :

- a. Sebagai dasar diambilnya sebuah keputusan dalam upaya evaluasi/ perbaikan dan pengembangan usaha ke arah yang lebih baik.
- b. Sebagai dasar diambilnya sebuah keputusan yang berkaitan dengan penilaian kinerja karyawan.
- c. Sebagai dasar diambilnya sebuah keputusan yang berkaitan dengan evaluasi terhadap ketentuan internal dan eksternal

3. AUDIT EKSTERN

Dengan keberadaan Audit Eksternal sesuai dengan fungsi dan tugasnya di sebuah Bank, dan dari hasil laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan akan dapat menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan berguna untuk pihak manajemen guna melakukan tindakan antara lain :

- a. Sebagai dasar dilakukannya review atas laporan/ informasi Keuangan atau Entitas pada Perusahaan
- b. Sebagai dasar dilakukannya evaluasi/ perbaikan terhadap kondisi kegiatan usaha yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- d. Dapat mengetahui potensi dan ancaman utama yang harus dihadapi oleh pihak manajemen sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk dilakukan perancangan kebijakan guna menghadapi ancaman tersebut dan tetap dapat menghasilkan keuntungan serta menghindari efek buruk dari tantangan tersebut.

A. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Terhadap kondisi BPR Harta Mandiri dengan Modal Inti sampai dengan akhir tahun 2016 berada di bawah 50.000.000.000,- (*lima puluh milyar*), pemenuhan struktur minimal yang harus dan telah dipenuhi adalah dengan komposisi antara lain dimana salah satu dari dua orang Direksi ditunjuk untuk membawahi fungsi Kepatuhan & Manajemen Risiko dengan dibantu oleh Pejabat Eksekutif dalam pelaksanaan kerjanya sesuai dengan peran dan fungsi yang dapat memberikan dampak yang positif antara lain adalah sebagai berikut :

1) Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain melakukan pengawasan dalam bentuk memberikan saran dan masukan serta memastikan segala proses kegiatan yang sedang berlangsung telah sesuai dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2) Fungsi Audit Internal

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain melakukan pengawasan terhadap hasil dari kegiatan pekerjaan dan terhadap hasil pemeriksaan untuk dijadikan sebagai informasi kepada pihak manajemen agar dapat dilakukan perbaikan.

3) Fungsi Manajemen Risiko

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain memberikan saran dan masukan serta penjelasan kepada pihak manajemen terhadap risiko yang akan timbul terhadap kebijakan yang akan diterapkan dan memberikan solusi bagaimana mengelola risiko tersebut sehingga apa yang telah direncanakan dapat tetap terlaksana dengan tidak mengabaikan risiko yang akan terjadi.

B. Batas Maksimum Pemberian Kredit

BPR Harta Mandiri, terhitung mulai berdiri hingga akhir periode tahun 2016, dalam kegiatan penyaluran kredit belum melakukan pemberian plafond kredit dengan nominal sama dengan atau melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Hal ini dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

C. Rencana Bisnis BPR

BPR Harta Mandiri, dalam upaya menumbuh kembangkan usaha bisnis berkeinginan dan bercita-cita untuk dapat tumbuh menjadi BPR yang besar dengan kualitas kesehatan yang optimal. Dan guna mewujudkan cita-cita tersebut telah menetapkan prinsip pertumbuhan dengan pola rembesan air. Maksudnya adalah, dengan secara tahap demi tahap dan dimulai dari daerah Kabupaten perbatasan dengan Kantor Pusat hingga Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Riau BPR Harta Mandiri akan memiliki Kantor Kas dan Kantor Cabang di daerah kabupaten yang ada di provinsi Riau. Hal ini di jelaskan sebagai berikut :

1. Rencana jangka Pendek

BPR Harta Mandiri dalam komitmen untuk membangun bisnis jasa keuangan berkeinginan untuk memiliki Kantor Kas di daerah perbatasan antara Kota Pekanbaru dengan daerah Kabupaten sekitar yang berpotensi dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Selain itu hal ini juga bertujuan untuk melakukan pengawasan atau mempelajari kondisi daerah Kabupaten tersebut apakah memiliki peluang untuk dilakukan pembukaan Kantor Cabang nantinya.

2. Rencana Jangka Menengah

BPR Harta Mandiri dalam komitmen untuk membangun bisnis di jasa keuangan berkeinginan untuk memiliki Kantor Cabang di daerah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Madya Pekanbaru.

3. Rencana Jangka Panjang

BPR Harta Mandiri dalam komitmen untuk membangun bisnis jasa keuangan dalam Rencana Jangka Panjang berkeinginan dan bercita-cita untuk memiliki Kantor Cabang di semua Kabupaten yang ada di provinsi Riau.

D. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

[Jelaskan hal-hal atau kejadian-kejadian signifikan yang terkait dengan keuangan maupun non-keuangan, misalnya kerugian yang signifikan, akuisisi/merger, dll]

I. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**A. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Bank dan/ atau perusahaan lain**

NAMA	JABATAN	KEPEMILIKAN SAHAM		
		BANK		PT LAINNYA
		Persentase	Nominal	
SUA INIE	Komisaris Anggota	50%	Rp.500.000.000,-	-
SIM ENGLIAN	Komisaris Utama	40%	Rp.400.000.000,-	-
JANSEN LINGGA	Direktur Utama	10%	Rp.100.000.000,-	-

B. Hubungan Keuangan / Keluarga anggota Direksi dengan Dewan Komisaris

NAMA DIREKTUR	NAMA KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN	HUBUNGAN KELUARGA
-	-	-	-

C. Hubungan Keuangan / Keluarga anggota Direktur dengan Pemegang Saham

NAMA DIREKTUR	NAMA PEMEGANG SAHAM	HUBUNGAN KEUANGAN	HUBUNGAN KELUARGA
-	-	-	-

II. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

A. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Bank dan/ atau perusahaan lain

NAMA	JABATAN	KEPEMILIKAN SAHAM		
		BANK	PERUSAHAAN LAINNYA	
			Saham	Perusahaan
SIM ENGLIAN	Komisaris Utama	40%		Tidak Ada
SUA INIE	Komisaris Anggota	50%		

B. Hubungan Keuangan/ Keluarga, anggota Dewan Komisaris dengan Komisaris Lain

NAMA KOMISARIS	NAMA KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN	HUBUNGAN KELUARGA
-	-	-	Tidak Ada
-	-	-	Tidak Ada
-	-	-	Tidak Ada

C. Hubungan Keuangan/ Keluarga, anggota Dewan Komisaris dengan Direksi

NAMA KOMISARIS	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN	HUBUNGAN KELUARGA
-	-	-	Tidak Ada
-	-	-	Tidak Ada
-	-	-	Tidak Ada

D. Hubungan Keuangan/ Keluarga, anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham

KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM	HUBUNGAN KEUANGAN	HUBUNGAN KELUARGA
-	-	-	Tidak Ada
-	-	-	Tidak Ada
-	-	-	Tidak Ada

III. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

A. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2016, disajikan sebagai berikut :

NO.	JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN			
		DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
		ORANG	JUTAAN - RP.	ORANG	JUTAAN - RP.
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	143.517.050,-	2	524.672.070
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) yang *) :	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada
	a. Dapat dimiliki				
	b. Tidak dapat dimiliki				
TOTAL					

*) diniki dalam ekivalen Rupiah

B. Jumlah remunerasi dalam 1 (satu) tahun untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi bila dikebmpokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG DALAM 1 TAHUN	JUMLAH DIREKSI	JUMLAH KOMISARIS
Diatas Rp.2 Milyar		
Diatas Rp.1 Milyar s/d Rp.2 Milyar		
Diatas Rp500 Juta s/d Rp1 Miyar		
Rp500 Juta kebawah	2 Orang	2 Orang

IV. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 2,65 Kali
2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1,55 Kali
3. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1,2 Kali
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 3,07 Kali

V. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	JUMLAH RAPAT	KEHADIRAN	PERSENTASE
SIM ENGLIAN	4	4	100%
SUAINIE	4	4	100%

VI. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Sepanjang tahun 2016, tidak ada fraud yang terjadi :

INTERNAL FRAUD DALAM 1 TAHUN	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH					
	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	TAHUN SEBELUM	TAHUN BERJALAN	TAHUN SEBELUM	TAHUN BERJALAN	TAHUN SEBELUM	TAHUN BERJALAN
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

VII. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi perseroan selama periode tahun 2016 dan telah diajukan melalui proses hukum :

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH PERDATA	JUMLAH PIDANA
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Tidak Ada Permasalahan	
Dalam proses penyelesaian		
TOTAL		

VIII. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2016, tidak ada pengambilan keputusan yang diwarnai benturan kepentingan antar pengurus, termasuk benturan kepentingan yang dapat merugikan atau menurunkan keuntungan Bank. Sepanjang tahun 2016, transaksi yang mengandung benturan kepentingan antara lain :

NO.	NAMA DAN JABATAN PIHAK YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN	NAMA DAN JABATAN PENGAMBIL KEPUTUSAN	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (JUTAAN RUPIAH)	KETERANGAN *)
-	-	-	-	-	-

IX. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

NO.	JENIS KEGIATAN SOSIAL	JENIS KEGIATAN POLISTIK	TANGGAL	NOMINAL DANA	
				PEMBERIAN	PENERIMAAN
1.	Sponsor Ship Waisak	-	07 Jun 2016	Rp.1.000.000,-	-
2.	Tour de Siak DISDIK Kab. Siak	-	08 Agst 2016	Rp.1.000.000,-	-
3.	HUT RI di DISDIK Kab. Siak	-	11 Agst 2016	Rp.2.000.000,-	-
4.	HUT RI Pemuda Kelurahan SAGO	-	23 Agst 2016	Rp.150.000,-	-
5.	Partisipasi Pemuda Pancasila	-	01 Nov 2016	Rp.250.000,-	-
6.	Sumbangan Dorprize Hari Guru DISDIK Kota Pekanbaru	-	16 Nov 2016	Rp.2.000.000,-	-
TOTAL				Rp.6.400.000,-	

PT. BPR HARTA MANDIRI

SIM ENGLIAN
Komisaris Utama

IANSEN LINGGA
Direktur Utama